



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 127, Februari 2020

PEMERIKSAAN LKKL TAHUN DI LINGKUNGAN AKN I



Audiensi Lemhannas RI dengan Tim Formatur Terpilih Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).....	2
Lemhannas RI Siap Terima Tim Pemeriksa LKKL Tahun 2019.....	3
Layanan Pembuatan Kartu Anggota Perpusnas RI.....	4
Kunjungan <i>Centre for Strategic and International Studies</i> (CSIS) ke Lemhannas RI	4
Outbound PPRA 60 Tingkatkan Solidaritas dan Soliditas Peserta.....	5
Delegasi Maktab Ketahanan Nasional Malaysia Kunjungi Lemhannas RI.....	6
Gubernur Lemhannas RI: "Nilai-nilai Konsensus Dasar Kebangsaan Harus Tercermin dalam Perilaku"	7
Peserta PPRA 60 Jalani Masa e-Learning....	8
Sejumlah Athan Negara Sahabat Menghadiri Sosialisasi PPRA 62.....	9
Wakil Gubernur Lemhannas RI Hadiri Peringatan Pemberontak PETA.....	10
Upacara Bendera Bulanan Lemhannas RI	10
Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Melakukan Kunjungan ke Lemhannas RI.....	11

Lemhannas RI Siap Terima Tim Pemeriksa LKKL Tahun 2019

Audiensi Lemhannas RI dengan Tim Formatur Terpilih Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)



Lemhannas RI menerima audiensi Tim Formatur Terpilih dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) periode 2019 – 2022 pada Selasa (28/01), di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Audiensi ini didasari kebijakan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi menjadi dua level eselon serta mengganti Jabatan Administrator (eselon 3) dan Pengawas (Eselon 4) dengan Jabatan Fungsional (JF). DR. Ing. Totok Hari Wibowo, M.Sc selaku Ketua Tim Formatur yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa Tim Formatur terpilih ingin berdiskusi lebih dalam lagi seberapa besar kemungkinan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia bisa berkolaborasi dengan Lemhannas RI.

"Dari pantauan kami, animo penghapusan eselon 3 dan 4 tersebut paling besar mengarah kepada jabatan fungsional analis kebijakan walaupun opsi lainnya banyak lagi, seperti peneliti, perekayasa, widyaiswara, dan lainnya," jelas Totok. Oleh karena itu, Lemhannas RI diminta untuk membandingkan bagaimana kelebihan yang satu terhadap yang lainnya dan juga memeriksa bagaimana proses konversinya karena ada tahapan-tahapan yang sudah sangat baku prosesnya.

Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia juga mempertimbangkan tentang adanya penambahan jumlah anggota Analis Kebijakan sendiri akibat adanya konversi tersebut sebesar minimal 10.000 anggota sehingga Analis Kebijakan menjadi penting di Indonesia.



Dari pantauan kami, animo penghapusan eselon 3 dan 4 tersebut paling besar mengarah kepada jabatan fungsional analis kebijakan walaupun opsi lainnya banyak lagi, seperti peneliti, perekayasa, widyaiswara, dan lainnya,

DR. Ing. Totok Hari Wibowo, M.Sc.

Ketua Tim Formatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

"Dari sekian lama perjalanan karier saya, saya melihat bahwa proses *policy making* yang berpegang pada kaidah yang baku bisa menemukan bagian yang lemah, namun proses untuk menuju ke arah penyempurnaan kebijakan itu harus terjadi, walaupun sudah ada kebijakan nasional yang mengarah ke sana, tetapi Kementerian/Lembaga masih ragu-ragu dalam proses memperbaiki *existing policy*," tambah Totok.

Maka dari itu, dalam proses pembentukan struktur fungsional yang baru, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ingin menjajaki ke berbagai Lembaga. Lemhannas RI menjadi tahap pertama Kementerian/Lembaga yang ditemui oleh Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia.

Lemhannas RI Siap Terima Tim Pemeriksa LKKL Tahun 2019

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi sejumlah pejabat Eselon I dan II Lemhannas RI menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2019 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I pada Jumat (31/1) di Auditorium BPK RI.

"Tim pemeriksa dari BPK RI memiliki tanggung jawab yang berat untuk dapat melaksanakan tugas kenegaraan tersebut, karena akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPR," ucap Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Oleh karena itu, Agus mengharapkan seluruh pihak yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI menyediakan dokumen dan informasi yang menjadi lingkup pengujian guna mendukung kelancaran pemeriksaan. Kelancaran pemeriksaan tersebut dapat mendukung kinerja BPK RI dalam memberikan opini secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Agus juga meminta para pimpinan kementerian/lembaga objek pemeriksaan dalam setiap klarifikasi/pembahasan materi untuk memberikan porsi pertama dalam menanggapi temuan pemeriksaan dengan bukti-bukti yang sah dan valid yang didasarkan pada kriteria pokok sebagai landasan hukum, sehingga mempercepat tindak lanjut dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam Dr. Hendra Susanto S.T., M. Eng., M.H., CfrA., CSFA., mengatakan bahwa



dalam pelaksanaan pemeriksaan, entry meeting adalah tahap penting. Menurutnya, komunikasi audit merupakan salah satu standar, maka perlu melakukan kegiatan entry meeting tersebut.

"Harapan saya dalam pemeriksaan BPK tahun ini, komunikasi antar pemeriksa dan semua pihak dapat berjalan dengan baik, sama-sama menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing," lanjut Hendra.

Hendra juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara demi kemajuan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme.

Kegiatan Pemeriksaan LKKL Tahun 2019 secara umum akan dilaksanakan mulai 6 Januari 2020 hingga 20 Mei 2020. Dimulainya kegiatan tersebut ditandai dengan



Tim pemeriksa dari BPK RI memiliki tanggung jawab yang berat untuk dapat melaksanakan tugas kenegaraan tersebut, karena akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPR,

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga di Lingkungan AKN I.

Entry meeting tersebut dihadiri Pejabat Kementerian/Lembaga di Lingkungan AKN I yakni Sekretaris Menko Polhukam, Kepala BNPT, Sestama Bakamla, Sesjen Wantannas, Ketua Komnas Perempuan, Kepala BSSN, Kepala BNN, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Ketua KPU, dan Kepala Bawaslu.

Layanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Nasional RI



Pembuatan kartu anggota tersebut dilakukan melalui stan Perpustakaan Nasional RI pada Rabu (22/1) di Lobby Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Dalam kegiatan tersebut, Perpustakaan RI mengirimkan enam personel yang dipimpin oleh Pustakawan Desi Adisiwati, S. Si. Mekanisme pelaksanaan pembuatan kartu anggota dimulai dengan pemasukan data dengan persyaratan membawa KTP. Bagi peserta PPRA 60 sebelumnya sudah dilakukan pemasukan data sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yakni foto dan pencetakan kartu.

Selain peserta PPRA 60, personel Lemhannas RI yang ingin membuat kartu anggota Perpustakaan RI, diharuskan mendaftar secara online terlebih dahulu melalui link website <https://keanggotaan.perpusnas.go.id/daftar.aspx>, yang kemudian mendapat nomor keanggotaan online dan dilanjutkan dengan foto dan pencetakan kartu.

Tujuan kegiatan tersebut adalah peningkatan layanan kepastakaan dan untuk mempermudah peserta PPRA 60 untuk mendapatkan referensi pengetahuan. Kerja sama ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Perpustakaan RI.

Sebanyak 87 peserta PPRA 60 dan 80 personel Lemhannas RI mengikuti pembuatan kartu anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kunjungan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ke Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan Executive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte dan Disaster Management Research Unit CSIS M. Habib Abiyan Dzakwan pada Kamis (30/1) di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI.

Philips menyampaikan rencana ke depan CSIS untuk membuat modul mitigasi bencana. Modul tersebut bertujuan agar para pemimpin dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus segera dilakukan untuk mengatasi keadaan setelah bencana. Menurut Philips, hal penanganan bencana juga

merupakan bagian dari keamanan nasional.

CSIS merupakan organisasi nirlaba independen yang didirikan pada tahun 1971 dan berfokus pada kajian yang berorientasi pada kebijakan isu-isu dalam negeri dan internasional. Dalam kesempatan tersebut, hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI adalah Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI



Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P dan Direktur Pengkajian Bidang Ideologi dan Politik Lemhannas RI Drs. Berlian Helmy, M.Ec.

Outbound PPRA 60 Tingkatkan Solidaritas dan Soliditas Peserta



Kegiatan outbound merupakan suatu kegiatan di alam terbuka yang bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan sesama peserta.

Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.
Sekretaris Utama Lemhannas RI

Setelah mengikuti orientasi selama 2 minggu, para Peserta PPRA 60 akan menjalani kegiatan di luar kampus (off campus) yang didahului dengan mengikuti kegiatan outbound terlebih dahulu. Kegiatan outbound tersebut dilaksanakan selama tiga hari yakni mulai Senin (3/2) hingga Rabu (5/2) di Cikereteg, Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. yang membacakan

sambutan Gubernur Lemhannas RI pada Upacara Pembukaan Outbound PPRA 60 menyampaikan bahwa kegiatan outbound merupakan suatu kegiatan di alam terbuka yang bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan sesama peserta.

Iriawan menambahkan bahwa rasa kekompakan dan kebersamaan tersebut akan mewujudkan hubungan personal yang kuat di antara peserta dan diharapkan akan tumbuh hingga para peserta selesai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Selama kegiatan outbound peserta akan diberikan persoalan berupa tantangan-tantangan yang harus diselesaikan yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para peserta. "Laksanakan kegiatan outbound dengan semangat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan," kata

Iriawan. Iriawan juga mengimbau para peserta untuk mewujudkan solidaritas dan soliditas di antara para peserta selama mengikuti outbound.

Tujuan lain dari kegiatan outbound PPRA 60 adalah untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan keakraban peserta satu sama lain atau antar individu, menghilangkan hambatan-hambatan personal, meningkatkan jiwa Nasionalisme dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa yakni NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kegiatan outbound tersebut, Peserta PPRA 60 juga dilatih untuk mempraktikkan kerja sama secara terpadu yang pelaksanaannya meliputi unsur perencanaan (plan), pelaksanaan (do), pengecekan (check), dan tindak lanjut (action). Kemudian meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan ketepatan waktu sesuai dengan prinsip QCDSM (Quality, Cost, Delivery Time, Safety, Moral).

Delegasi Maktab Ketahanan Nasional Malaysia Kunjungi Lemhannas RI



Dipimpin oleh Mayjen Dato' Hj Md Yusof bin Azis, sebanyak 29 orang delegasi Maktab Ketahanan Nasional Malaysia melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, pada Rabu (5/2) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai 4, Lemhannas RI.

Tujuan kunjungan tersebut adalah agar delegasi Maktab Ketahanan Nasional Malaysia dapat belajar dan berdiskusi bagaimana Lemhannas RI berkontribusi pada negara. "Tujuan lawatan kita kesini adalah sebagai *study visit*, kita ingin membuat *comparative study*" jelas Yusof.

Maktab Ketahanan Nasional Malaysia merupakan bagian dari National Resillience College (NRC) Malaysia. NRC sendiri merupakan bagian dari Pusat Pengajian Pertahanan Nasional (Puspahanas). Di bawah Puspahanas, NRC Malaysia memiliki

3 Maktab yakni Maktab Ketahanan Nasional, Maktab Pertahanan Angkatan Tentara, dan Maktab Terus Angkatan Tentara.

Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Geografi Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, S.H., M.A. memberikan penjelasan mengenai Lemhannas RI. Endang membuka paparannya dengan menjelaskan bahwa Lemhannas RI yang dipimpin oleh seorang Gubernur adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung pada presiden.

Endang juga menyampaikan visi dan misi Lemhannas RI. "Visi Lemhannas RI yakni Menjadi Lembaga yang Berkualitas, Kredibel, dan Berkelas Dunia dalam Bidang Ketahanan Nasional," papar Endang. Kemudian Endang menjelaskan bahwa

visi tersebut didukung oleh 3 misi, yakni Mewujudkan Kader Pimpinan Tingkat Nasional yang Berdaya Saing, Berkarakter Kebangsaan, Demokratis, dan Mampu Berperan dalam Pergaulan Dunia Internasional melalui Pendidikan, kemudian Memberikan Masukan Pemerintah dalam Pengambilan Kebijakan Internasional, Regional, dan Nasional melalui Pengkajian Strategis, serta Mewujudkan Komponen Bangsa yang Berkarakter Kebangsaan sesuai Empat Konsensus Dasar Bangsa melalui Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Kemudian Endang juga menjelaskan jenis pendidikan yang diselenggarakan Lemhannas RI, yaitu Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Gubernur Lemhannas RI: “Nilai-Nilai Konsensus Dasar Kebangsaan Harus Tercermin dalam Perilaku”



Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara pada acara launching dan kuliah perdana bersama santri nusantara Akademi Ilmu Pancasila (AIP), pada Rabu (05/02) di Wisma Kementerian Agama, Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Akademi Ilmu Pancasila (AIP), Haidar Alwi. Kuliah perdana ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, guru-guru dan siswa dari SMP, SMA, dan SMK di Jakarta, perwakilan Organisasi Masyarakat, dan perwakilan dari perpustakaan yang nantinya akan mengisi buku-buku Pancasila di Akademi Ilmu Pancasila.

Tujuan dibentuknya Akademi Ilmu Pancasila ini karena Pancasila diharapkan mampu membentengi

masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. “Mohon arahan, bimbingan dan Kerjasamanya dengan Lemhannas RI di kemudian hari, agar kita dapat menjalankan program Presiden Jokowi yaitu, untuk membumikan Pancasila,” kata Haidar dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut juga, Agus berterima kasih kepada Akademi Ilmu Pancasila yang telah membumikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan tugas bersama, termasuk Lemhannas RI yang bertugas menyelenggarakan Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai salah satu fungsinya.

Dalam paparannya Agus menjelaskan bahwa, Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari

khususnya dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

“Salah satu upayanya adalah melalui pendidikan yang berkarakter Pancasila, sehingga terwujud sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas unggul, berpikiran terbuka, serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya,” tambah Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar kebangsaan harus tercermin dalam perilaku perseorangan warga bangsa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan intisari dari nilai asli yang terdapat di masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia sampai saat ini dapat hidup dengan tenteram dibawah naungan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu,” pungkas Agus.

Peserta PPRA 60 Jalani Masa e-Learning



Peserta PPRA 60 memasuki masa kegiatan pembelajaran jarak jauh yakni *e-Learning* yang dimulai sejak Jumat (7/2) hingga Selasa (3/3). Perkembangan teknologi informasi mendorong Lemhannas RI untuk memanfaatkan sistem *e-Learning* dalam proses pembelajaran. *e-Learning* merupakan proses pembelajaran jarak jauh untuk menimba ilmu tanpa harus bertatap muka di kelas.

Penyelenggaraan *e-Learning* dilaksanakan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok akan didampingi seorang pembina materi dan seorang tutor. Pembina materi adalah Tenaga Ahli Pengajar/Tenaga Ahli Pengkaji/Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI yang sudah ditentukan dan ditunjuk untuk

menilai kualitas jawaban dan produk, aktivitas, dan kualitas diskusi peserta. Sedangkan tutor adalah pejabat eselon II atau III Lemhannas RI yang ditugaskan untuk mengecek dan mencatat kehadiran serta keaktifan peserta.

Pelaksanaan *e-Learning* sendiri terdiri dari metode *chatting* dan *video conference*. *Chatting* adalah kegiatan tanya jawab secara tertulis yang menggunakan perangkat elektronik secara *online*. Dalam *chatting* peserta akan menjawab persoalan yang diberikan pembina materi dan dilanjutkan dengan diskusi antar peserta yang dipandu oleh pembina materi. Sedangkan dalam *video conference*, peserta melaksanakan diskusi secara tatap muka langsung dengan cara telekonferensi yang dipimpin oleh ketua kelompok dan dipandu pembina materi.

Selama menjalani *e-Learning*, peserta akan diberikan 6 bidang studi yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, Sistem Manajemen Nasional, serta Kepemimpinan Nasional.

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI adalah menyiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional yang mampu berpikir secara komprehensif, integral, profesional, berkarakter, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.

Sejumlah Athan Negara Sahabat Menghadiri Sosialisasi PPRA 62

Untuk menjangkau peserta mancanegara pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Tahun Ajaran 2021, Biro Kerja Sama Lemhannas RI mengadakan sosialisasi kepada sejumlah atase pertahanan negara sahabat pada Rabu (12/2) di Ruang Airlangga Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Edy Supriyanto memberikan penjelasan mengenai Lemhannas RI. Edy menjelaskan bahwa Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Visi Lemhannas RI adalah Menjadi Lembaga yang Berkualitas, Kredibel, dan Berkelas Dunia dalam Bidang Ketahanan Nasional," jelas Edy. Selanjutnya Edy menjelaskan mengenai tiga misi Lemhannas RI yakni Mewujudkan Kader Pimpinan Tingkat Nasional yang Berdaya Saing, Berkarakter Kebangsaan, Demokratis, dan Mampu Berperan dalam Pergaulan Dunia Internasional melalui Pendidikan, kemudian Memberikan Masukan Pemerintah dalam Pengambilan Kebijakan Internasional, Regional, dan Nasional melalui Pengkajian Strategis, serta Mewujudkan Komponen Bangsa yang Berkarakter Kebangsaan sesuai Empat Konsensus Dasar Bangsa melalui Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Kemudian Edy menjelaskan lebih dalam mengenai penyelenggaraan PPRA. "PPRA adalah Program Pendidikan Reguler yang biasanya diikuti oleh 80 sampai 100 peserta," kata Edy. Peserta PPRA terdiri dari TNI, Polri, dan Sipil dan



akan mengikuti pendidikan selama 7 bulan yang terdiri dari 1 bulan *off campus* dan 6 bulan *on campus*.

Calon peserta yang berasal dari negara sahabat diharuskan untuk mengikuti kursus Bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum mengikuti PPRA. "PPRA 62 direncanakan dibuka pada 26 Januari 2021 dan direncanakan selesai pada 31 Agustus 2021," ungkap Edy.

Bagi calon peserta PPRA 62 Tahun Ajaran 2021, kursus Bahasa Indonesia akan diselenggarakan mulai 1 Juli 2020 hingga 11 Desember 2020. Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa kursus Bahasa Indonesia terdiri dari 4 tingkatan yakni *beginner level*, *intermediate level*, *advanced level*, dan *expert level*.

Selain mendapatkan kursus Bahasa Indonesia, calon peserta PPRA 62 Tahun Ajaran 2021 juga akan mendapatkan pengenalan budaya lokal dan *pre-course*.



Visi Lemhannas RI adalah Menjadi Lembaga yang Berkualitas, Kredibel, dan Berkelas Dunia dalam Bidang Ketahanan Nasional

Kolonel Edy Supriyanto
Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri
Lemhannas RI

Pengenalan budaya lokal bertujuan untuk mengenalkan Budaya Indonesia kepada calon peserta PPRA dengan mengunjungi daerah di Indonesia sehingga dapat langsung belajar dari daerah tersebut. Sedangkan pada *pre-course*, peserta akan mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pendidikan yang akan diikuti peserta.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Hadiri Peringatan Pemberontakan PETA



Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Wieko Syofyan menghadiri acara Peringatan Pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air) pada Jumat (14/2) di Monumen dan Museum PETA, Bogor, Jawa Barat.

Mengawali sambutannya, Wieko yang mewakili Gubernur Lemhannas RI menyampaikan mengenai sejarah pemberontakan PETA di Blitar pada tahun 1945.

"Pemberontakan PETA di Blitar yang terjadi pada tanggal 14 februari 1945 yang dipimpin oleh Shodancho Soeprijadi terhadap pasukan Jepang. pemberontakan ini muncul atas keprihatinan Soeprijadi melihat penderitaan rakyat yang berada di bawah penjajahan Jepang selama Perang Dunia kedua," jelas Wieko.

Pemberontakan tersebut, jelas Wieko, berhasil membunuh sejumlah

tentara Jepang, serta pasukan PETA pimpinan Soeprijadi berhasil melarikan diri. Namun, struktur komando Jepang yang tidak membentuk komando terpusat PETA, berhasil mencegah suksesnya pemberontakan tersebut.

Kemudian, Wieko menjelaskan bahwa para tentara PETA yang tertangkap kemudian diadili di Jakarta, sebanyak 68 orang anggota PETA yang memberontak ditangkap dan dihukum mati, sementara Soeprijadi sendiri tidak ditemukan sampai hari ini. Atas jasanya, beliau secara resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975 berdasarkan Keputusan Presiden NO. 063/TK/1975.

Mencermati lingkungan strategis saat ini, Wieko menyampaikan rasa prihatinnya atas adanya keinginan kelompok tertentu untuk disintegrasi dari negara kesatuan, meningkatkan ancaman radikalisme, tindakan

intoleransi, dan berbagai bentuk kekerasan yang muncul di masyarakat.

Wieko mengatakan bahwa peristiwa PETA di Blitar memiliki makna yang sangat khusus sebagai simbol perlawanan atas penjajahan terhadap bangsa yang melahirkan kesengsaraan dan penderitaan yang sangat berat. Pemberontakan tentara PETA Daidanco Blitar merupakan pencerminan gelora semangat keberanian, jiwa kepatriotan/cinta tanah air dengan segala macam pengorbanannya, baik jiwa maupun raga putra-putri bangsa.

"Saya berharap agar kita semua dapat merenungkan kembali langkah dan perjuangan yang telah dikorbankan oleh para pendahulu dan pendiri bangsa. Perjuangan dan pengorbanan para founding fathers telah dan akan terus menjadi spirit dalam bermasyarakat, bernegara, dan mempertahankan NKRI," pungkas Wieko menutup sambutannya.

Upacara Bendera Bulanan Lemhannas RI

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Bulanan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan selaku inspektur upacara pada Senin (17/02), di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Wieko yang membacakan Amanat Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa saat ini WHO telah menetapkan wabah virus corona (COVID-19) sebagai Global Emergency atau keadaan darurat global atas merebaknya kasus tersebut di hampir 27 negara. Merespons hal tersebut, Wieko mengimbau kepada seluruh anggota Lemhannas RI untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi segala kemungkinan dengan selalu mengutamakan dan menjaga kesehatan.

Kemudian menyinggung program kerja tahun anggaran 2020, Wieko menyampaikan bahwa Kedepatian bidang

pendidikan Lemhannas RI pada tahun ini telah membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 pada tanggal 21 Januari 2020. Sementara, PPRA 61 yang akan dibuka pada Maret 2020.

Sementara, kedepatian pengkajian strategik Lemhannas RI saat ini juga tengah fokus menyiapkan kajian-kajian komprehensif dengan diadakannya rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Menentukan posisi haluan negara dalam sistem presidensial guna keberlanjutan pembangunan nasional" dan FGD terkait "Pengaruh sengketa Amerika Serikat dan Iran terhadap stabilitas nasional" pada awal februari 2020.

Sedangkan dalam bidang



Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan saat ini tengah melaksanakan kegiatan Taplai angkatan IV bagi anggota Kadin yang berlangsung sejak tanggal 17 – 23 Februari 2020. Kemudian pada maret 2020 nanti akan diselenggarakan dialog wawasan kebangsaan di D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Upacara bendera tersebut, diikuti oleh para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, dan Pejabat Struktural Lemhannas RI dan seluruh anggota Lemhannas RI.

Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Melakukan Kunjungan ke Lemhannas RI



Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Melakukan Kunjungan ke Lemhannas RI

Mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Rabu (19/02).

Kunjungan tersebut diterima oleh

Kepala Bagian Protokol dan Peliputan Biro Humas Lemhannas RI, Letkol ARH Alton Endarwanto Hadi Susanto di Ruang Gatot Kaca, Gedung Asta Gatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Dinda Shafa selaku perwakilan dari Universitas Mulawarman mengatakan bahwa tujuan dari kunjungan ke Lemhannas RI salah satunya adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Lemhannas RI.

Alton yang mewakili Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Lemhannas RI. Alton menjelaskan tiga kedepatian yang ada di Lemhannas RI yaitu Kedepatian Pendidikan, Pengkajian, dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Dalam kunjungan tersebut juga hadir Tenaga Profesional bidang Geografi dan SKA Lemhannas RI, Dr. Sukendra Martha, M.Sc., M.AppSc. selaku narasumber yang menyampaikan materi

berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi".

Sukendra menjelaskan bahwa, antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan merupakan dua hal yang saling bersaing, "Jika ingin ekonominya tumbuh maka lingkungannya dirusak, dan sebaliknya jika ingin mempertahankan lingkungan, ekonominya yang tidak akan berkembang, kesannya seperti itu, sekarang bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan baik tanpa merusak lingkungan hidup?," tambah Sukendra.

Selain itu, Sukendra menyebutkan bahwa setiap negara harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan karena dampaknya akan diterima oleh semua penghuni bumi. "Jika suatu negara tidak care dan tidak concern terhadap perubahan iklim ini maka dampaknya akan menimpa negara-negara lain," tambah Sukendra.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Redaktur: **Adri Koesdyanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>